KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Sikap DPR Terkait RUU PKS masih Terbelah
Tanggal : Jumat, 20 Agustus 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Sikap DPR Terkait RUU PKS masih Terbelah

Koalisi Perempuan Indonesia sesalkan sikap Ketua DPR yang tidak serius mengesahkan RUU PKS.

Cahya Mulyana
cahya@mediaindonesia.com

RANCANGAN Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dinilai dapat mengeliminasi angka kekerasan terhadap kaum perempuan. Sayangnya, sikap DPR masih terbelah karena kepentingan politik, bahkan Ketua DPR Puan Maharani tidak menyinggung RUU ini untuk segera disahkan di masa sidang kali ini.

Seperti NasDem, Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan PKB akan mengawal RUU PKS hingga disahkan. "Fraksi PKB itu pengusul di RUU ini. Jelas kita terus kawal prosesnya," tegasnya kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Wakil Ketua Baleg dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi (Awiek) menampik tanggapan yang menyebut DPR tidak proaktif dalam melakukan pembahasan RUU PKS. Awiek mengklaim justru DPR melalui Baleg memiliki inisiatif yang kuat untuk menuntaskan pembahasan RUU PKS. "Kalau kami tidak peduli tidak akan menjadikannya sebagai usulan inisiatif DPR. Atas kebesaran kawan-kawan di Baleg mengambil RUU ini menjadi inisiatif DPR," paparnya.

Melihat kondisi itu Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati mendesak seluruh komponen wakil rakyat bersatu untuk mengesahkan RUU Ini. Pasalnya, bakal payung hukum ini sangat dibutuhkan untuk melindungi martabat kaum hawa dan dari tindak kekerasan.

Menurut dia, sejak awal digagas pembahasan RUU PKS ini sarat dengan pro-kontra dan manuver politik. Belum lagi resistansi dari beberapa fraksi yang menganggap RUU PKS bermuatan ideologi liberal.

"Padahal, RUU PKS ini didorong untuk merespons jatuhnya korban kekerasan seksual yang semakin bertambah dan locus kejadian yang sudah mengarah pada area publik, seperti di tempat kerja, sekolah, pesantren, kampus, fasilitas publik jalan, transportasi umum," papar Mike kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Sesalkan

Mike menyesalkan sikap Ketua DPR yang tidak serius mengesahkan RUU PKS. "Ini semakin menguatkan proses kebijakan memang lebih kuat pada politik kepentingan ketimbang kebutuhan *real* dan *emergency* dari rakyat yang membutuhkan kebijakan yang berpihak pada korban," terangnya.

Sangat disayangkan RUU PKS ternyata bukan menjadi pemikiran untuk memastikan perlindungan warga negara. Padahal, angka dan jumlah kasus jelas makin bertumbuh pesat dan belum lagi kekerasan seksual berbasis daring, yang saat ini juga banyak menimpa masyarakat, dengan yang paling rentan menjadi korbannya dari kalangan anak-anak.

"Debat panjang soal terganggunya nilai-nilai agama akan RUU ini di parlemen justru semakin menunjukkan bahwa negara lewat parlemen abai terhadap kekerasan seksual yang marak terjadi, yang sebenarnya ini juga bertentangan dengan nilai agama," jelasnya.

Sayangnya, proses penyusunan kebijakan cenderung membela kepentingan kekuasaan, keuntungan bisnis dan kapital.

"Saya juga menghaturkan salut yang tinggi kepada anggota legislatif dan fraksi-fraksi parpol di parlemen yang telah berkomitmen tinggi mendukung dan berjuang memastikan RUU PKS bisa berlanjut di parlemen," pungkasnya. (Uta/P-5)